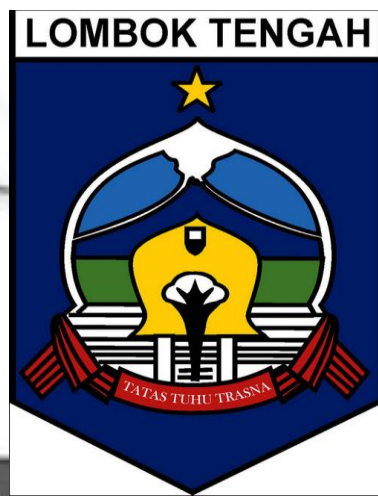


RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2021-2026

DINAS SOSIAL



DINAS SOSIAL

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Alhamdulillah kami telah menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026

Rencana Startegis disusun berdasarkan hasil rumusan seluruh personil dan Stake Holder dengan mengacu pada Rancangan awal RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi penyusunan RENSTRA ini, sehingga segala usul dan saran yang bermanfaat untuk perbaikan dan penyempurnaan RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sangat diperlukan. Karena RENSTRA merupakan dokumen 5 (lima) Tahunan SKPD yang akan dijadikan sebagai pedoman Pelaksanaan Pembangunan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses perumusan dan penyusunan RENSTRA ini.

Praya, 8 September 2021



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1-4
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
2.1. Tugas , Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6-8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	9-13
2.2.1. Sumber Daya Aparatur	9-10
2.2.2. Sarana dan Prasarana (Aset/modal)	10-13
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14-16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	17
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	18
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	18
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	18-20
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	20
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	20-21
3.5. Penentuan Isu – isu strategis	21-22
BAB IV TUJUAN, SASARAN	23
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	23-24
1. Tujuan	23
2. Sasaran	23-24
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	25
1. Strategi	25-27
2. Arah Kebijakan	28-29
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	30-49
BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	50
BAB VIII PENUTUP	51

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan daerah, maka perlu dilaksanakan pembangunan disektor sosial dengan berbagai macam kegiatan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat didayagunakan secara optimal, efektif dan efesien.

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, yang mempunyai tugas dibidang Sosial, terus berupaya melaksanakan program dan kegiatan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Disamping itu hal yang harus dilaksanakan adalah yang menyangkut keterpaduan, kecermatan program, hal yang harus dilaksanakan adalah menyangkut keterpaduan, kecermatan program dan kegiatan karena merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya khususnya arah kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara terus menerus dan berkelanjutan.

Sedangkan fungsinya adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan kerja.

Agar pembangunan terarah dan berkesinambungan, maka perlu adanya perencanaan strategi yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan program kerja.

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 68 Tahun 2016, tentang urusan pemerintahan daerah tentang pembentukan kedudukan, tugas pokok dan susunan organisasi Dinas Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Rencana Strategis Dinas Sosial adalah dokumen teknis operasional yang merupakan pedoman dan penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja sektor sosial selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, 2021-2026 (Permendagri No 54 Tahun 2010).

1.2 Ladasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4609);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 24. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009;
 25. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 ;
 26. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
 28. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*
 29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 -2025;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6),

31. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8).
32. Perda No 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 2),
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6),
34. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 68 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 68),

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial dimaksudkan untuk :

- 1.3.1 Dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah setiap tahun.
- 1.3.2 Dijadikan acuan dalam penyusunan RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan DPA-SKPD sebagai dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah
- 1.3.3 Dijadikan payung hukum penetapan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) ini adalah agar pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial berjalan efektif dan efisien, terarah, terkendali, terpadu dan berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dalam kedudukannya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai instansi yang melaksanakan urusan wajib yang memiliki fungsi dan tugas menangani permasalahan-permasalahan kesejahteraan sosial yang tercakup dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 68 Tahun 2016.

Berdasarkan hal tersebut diatas pada pasal 6 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 68 tahun 2016 tentang Rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi Daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang sosial;
- b. pelaksanaan Kebijakan teknis dibidang sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis dibidang sosial;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di bidang sosial;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas sosial , terdiri dari:

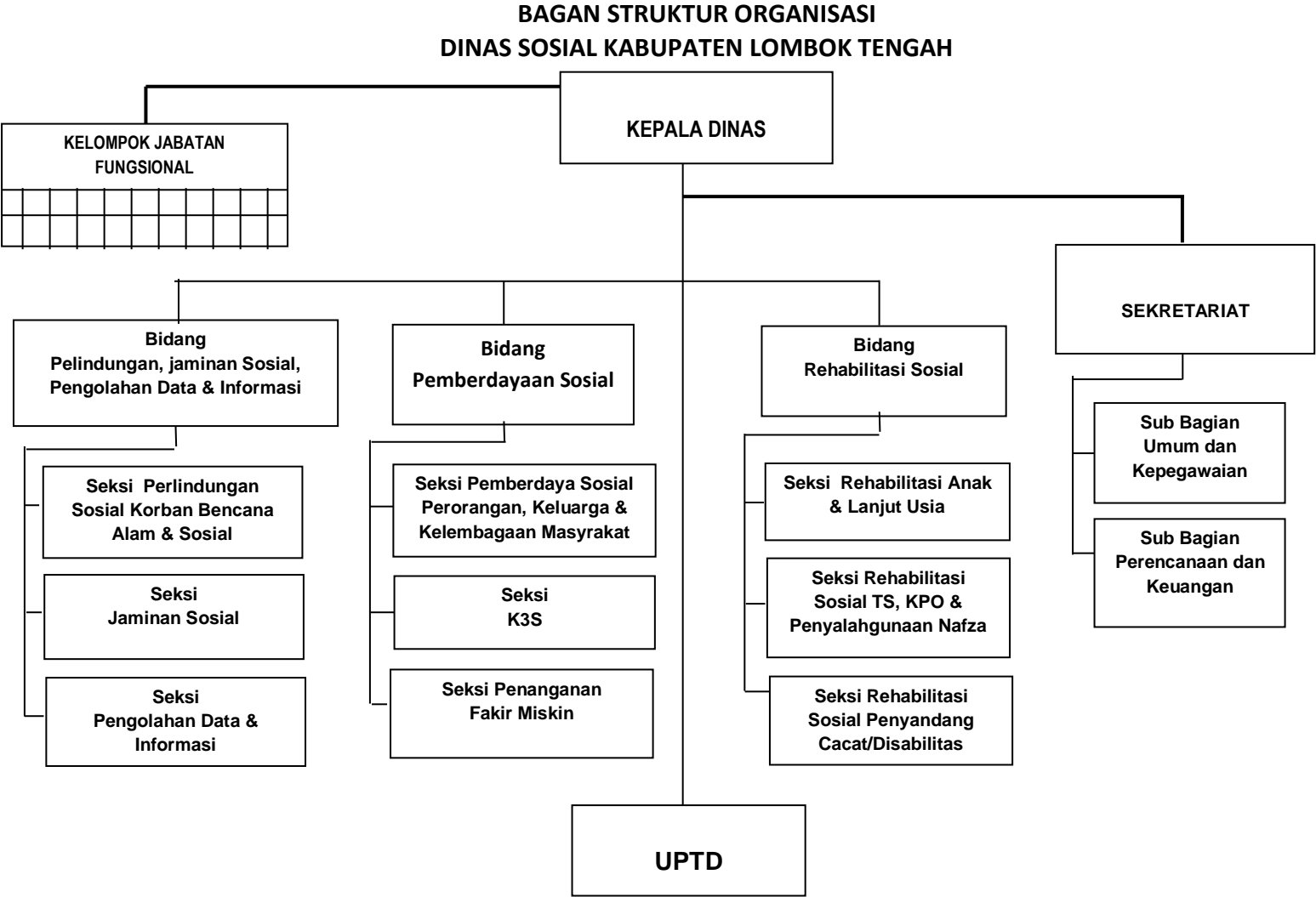
- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:

- 1) Bidang Pelindungan, Jaminan Sosial, Pengelolaan Data Dan Informasi
 - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial
 - b. Seksi Jaminan Sosial Keluarga
 - c. Seksi Pengelolaan Data Dan Informasi
- 2) Bidang Pemberdayaan Sosial
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga Dan Kelembagaan Masyarakat
 - b. Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial Dan (K3S)
 - c. Seksi Penanganan Fakir Miskin
- 3) Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang Dan Penyalahgunaan Nafza
 - c. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat/Disabilitas

Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Aparatur Daerah

Dalam upaya mewujudkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, Dinas Sosial didukung oleh Sumber Daya Aparatur (SDM) yang terdiri dari : Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 31 orang. Jumlah dan komposisi pegawai dimaksud sebagai berikut :

1. Kondisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 2.1 Data Status Kepegawaian Pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah

NO	UNIT KERJA	JUMLAH			PERSENTASE			KET
		PNS	CPNS	PTT	PNS	CPNS	PTT	
					(%)	(%)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	DINAS SOSIAL	27	-	4	87,10	-	12,90	
JUMLAH		27	-	4	87,10	-	12,90	

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah 2021

2. Kondisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel. 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

N O	UNIT KERJA	MENURUT GOLONGAN				PERSENTASE			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
						(%)	(%)	(%)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	DINAS SOSIAL	-	7	16	4	-	25,93	59,26	14,82
JUMLAH			7	16	4		25,93	59,26	14,82

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah 2021

3. Kondisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Sosial Kab. Loteng

Tabel. 2.3 Kondisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN								
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	DINAS SOSIAL			9			2	1	12	3
2										
JUMLAH				9			2	1	12	3

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah 2021

4. Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan pada Dinas Sosial Kab. Loteng

Tabel. 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	UNIT KERJA	JABATAN					KET
		ES. I	ES. II	ES. III	ES. IV	FUNGSIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	DINAS SOSIAL	-	1	3	11	-	
JUMLAH		-	1	3	11		

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah 2021

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset/modal)

Aset/modal yang dimiliki oleh SKPD Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dalam menunjang kelancaran pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi adalah seperti yang digambarkan pada table dibawah ini :

Tabel 2.5 Daftar Aset /Modal Dinas Sosial Kab. Loteng

No Reg	Nama/Jenis Barang	Tahun Perolehan	Vulume	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4		5	6
1. Tanah						
0001	Tanah Bangunan Kantor					

	Pemerintah					
0002	Tanah Kantor Pemerintah	Tahun 2000	10.000	M2	10.000 m2	TMP
0003	Tanah Kantor Pemerintah	Tahun 1974	700	M2	700 m2	LBK
0004	Tanah Kantor Pemerintah	Tahun 1974	2.000	M2	2.000 m2	Perumsos Jln lala Seruni
0006	Tanah Kantor Pemerintah	Tahun 1994	11.836	M2	11.836 m2	Eks. Kantor Satpol PP
Jumlah (Tanah)						
2. Peralatan dan Mesin						
	Alat Angkutan (Kendaraan Roda 2,4 dan 6		22	Unit	22 unit	
	Almari Arsip Kayu		12	Bh	12 bh	
	White Boar		1	BH	1 bh	
	Kursi Rapat Biru (Uciwa)		5	BH	5 bh	
	Meja Bundar		1	unit	1 unit	
	Kursi tamu		4	unit	4 unit	
	Kursi Plastik		30	BH	30 bh	
	Kursi Lipat		17	BH	17 bh	
	Meja dan Kursi kerja Pejabat dan stap		47	Bh	47 bh	Meja 29, Kursi 28
	Komputer/PC		4	Unit	4 unit	
	Laptop		11	unit	11 unit	
	Note Book		2	unit	2 unit	
	Printer		11	unit	11 unit	
	UPS		2	buah	2 bh	
	Hardisd		3	buah	3 bh	
	Alat-alat studio dan komunikasi		2	Set	2 set	
	Mega Phone		1	buah	1 bh	
	Camera Digital		4	buah	4 bh	
	Mesin Potong Rumput		2	BH	2 bh	
	LCD		2	Unit	2 unit	
	AC		2	Unit	2 unit	
	Kipas Angin		6	BH	6 bh	
	Televisi		1	BH	1 bh	

	Wireles		2	Unit	2 unit	
	Microphon		2	BH	2 bh	
	Tiang Mic Berdiri		2	BH	2 bh	
Jumlah (Peralatan dan Mesin)						
3. Gedung dan Bangunan						
0001	Bangunan Gedung Kantor Permanen					
0001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	2017	24	M2	24 m2	
0001	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	2017	35	M2	35 m2	
0001	Asrama Permanen					
0001	Rumah Negara Golongan II Type E Semi Permanen	1974	128	m2	128 m2	
0001	Bangunan Gudang Lain-lain					
0001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen					
0001	Bangunan Gedung Kantor Permanen					
0001	Asrama Semi Permanen					
0001	Bangunan Pagar Makam	2014	1000	M	100 m	TMP
0001	Tugu Kemerdekaan					
0001	Asrama Permanen					
0001	Rumah Negara Golongan II Type C Permanen					
0001	Rumah Negara Golongan II Type E Permanen					
0001	Gedung Pos Jaga Permanen	2017	6	M2	6 m2	
0001	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen, Tiori					
0001	Konstruksi Pagar	2016	70	M	7 M	PKH
0002	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen					
0001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen					
0001	Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen					
0002	Bangunan Gudang Tertutup Permanen					

0003	Bangunan Gudang Tertutup Permanen					
0002	Bangunan Gedung Kantor Permanen					
0003	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen					
0001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen					
0001	Rehab Ruang Sekretariat					
0001	Pemasangan Rabat	2016	21	M2	25m2	PKH/LBK
0001	Rehab Ruang Laboratorium					
0001	Rehab Ruang Instruktur					
0001	Rehab Gedung Pralatan					
0001	Pemagaran Halaman Kantor	2017	100	m	100 m	Eks Pol PP
0001	Rehab Ruang PB					
0001	Pemasangan Keramik Gedung Kantor Sekretariat					
0001	Pemasangan Paving Block TMP	2016	50	M	49,674,000	Dinsos
Jumlah (Peralatan dan Mesin)						

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan target/sasaran Rencana Strategis(RENSTR) periode 2016-2020 seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kab. Loteng

No	Indikator kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Urusan Sosial																		
1.	Persentase Penanganan PMKS				86,90	23,99	31,57	35,80	38,91	13,10	51,80	28,27	40,37	139,76	15,07	215,9	89,55	112,77	359,1
2.	Persentase Lembaga Sosial yang Aktif				69,04	34,86	39,45	44,04	48,62	30,96	62,01	88,13	52,77	49,34	44,84	177,8	223,4	119,8	101,4

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah 2021

Untuk pencapaian kinerja dinas sosial periode 2016 – 2020 rata rata sudah tercapai, baik penanganan PMKS maupun pembinaan/pemberdayaan Lembaga-lembaga sosial. ini tidak terlepas dari dukungan anggaran dan bantuan baik dari pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun pihak-pihak lain yang perhatian/peduli dengan masalah kesejahteraan sosial.

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke- (Juta)					Kabupaten Lombok Tengah										Rata-rata Pertumbuhan (Juta)	
						Realisasi Anggaran pada Ke- (Juta)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)						
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.355	3.991	3.516	4.750	3.426	1.295	3.875	3.460	4.701	3.216	95,57	97,09	98,41	98,97	93,87	3.408	3.309
Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial	140	328	278	191	87	134	299	267	191	85	95,71	91,16	96,04	100	97,70	205	195

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah 2021

Rasio antara realisasi dan anggaran selama 2016 – 2020 kecenderungannya naik(baik) ini dapat dilihat pada table 2.2 mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2019 kecuali pada tahun 2020 turun, ini diakibatkan adanya bencana non alam covid-19 dimana ada beberapa program/kegiatan yang tidak dilaksanakan terkait aturan protocol kesehatan, seperti bimtek/pertemuan/rapat.

Untuk Sumber Daya Manusia(SDM) pada Dinas Sosial Kab.Lombok Tengah sangat terbatas, hanya 27 orang ASN ditambah dengan 4 Orang PTT, sementara beban tugas cukup besar. kualifikasi ASN yang ada kebanyakan diluar profesi kesejahteraan sosial, hanya ada 2 ASN yang berlatar belakang ilmu kesejahteraan sosial. Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah juga sangat membutuhkan ASN yang berpendidikan Sarjana(S1)Komputer/IT, ini terkait dengan pengelolaan data DTKS, PMKS dan PSKS(SIKS-NG).

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah yang melaksanakan Urusan Sosial yang merupakan urusan wajib pemerintah yang memiliki cakupan pelayanan yang cukup luas. Berikut Cakupan Jenis Pelayanan SKPD dan Kelompok Sasaran berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial :

Tabel 2.3 Jenis Pelayanan Dinas Sosial dan Kelompok Sasaran

No	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
(1)	(2)	(3)
Urusan Sosial		
1	Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	PMKS yang terdiri dari 26 jenis PMKS
2	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna (KT), PSM, Tagana , TKSK , dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah 2021

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengidentifikasi Isu SKPD yang bersifat Strategis terlebih dahulu dikemukakan permasalahan permasalahan pelayanan SKPD. Dari hasil analisis pada bab-bab sebelumnya Dinas Sosial mengidentifikasi permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang di gunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Ekternal (diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Organisasi	Dinas Sosial	Perda dan Perbup ttg SOTK	-	Restrukturisasi Organisasi	Beban Pelayanan SKPD yang tidak diimbangi dengan Sumber Daya yang memadai
2. Sumber Daya Manusia	31 (PNS dan PTT)	Reg. Pegawai 2021	Mengoptimal kan Peran SDM yg Tersedia	Penempatan pegawai	Pelayanan SKPD belum optimal
3. Pemberdayaan PMKS dan PSKS	Belum Optimalnya Pemberdayaan Terhadap PMKS dan PSKS	Data PMKS dan PSKS Thn.2019	Pemberdayaan terhadap PMKS dan PSKS	Kecendrungan PMKS yang semakin bertambah	Masih Rendahnya cakupan Pelayanan terhadap PMKS dan pembinaan terhadap PSKS

Sumber: Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah 2021

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1. Visi Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026

Visi Yaitu menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu 2021-2026 yaitu : “ **MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN , SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA) ”.**

Pernyataan yang tertuang dalam dalam Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 ini sangat terkait dengan keinginan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang sejahtera dengan dilandasi oleh kualitas hidup masyarakat yang bermutu disegala aspek kehidupan dan disertai pengamalan nilai-nilai agama. Visi **BERSATU JAYA** tersebut mengandung 5 (lima) kata kunci, yaitu :

- Kata **‘Beriman’** berarti merupakan gambaran utuh jiwa Akhlakul Karimah masyarakat Lombok Tengah sebagai dasar dari seluruh aktifitas kehidupan yang dijalani masyarakat;
- Kata **‘Sejahtera’** berarti menggambarkan Masyarakat Lombok Tengah yang terpenuhi segala kebutuhan dasarnya dengan cara yang mudah;
- Kata **‘Bermutu’** berarti merupakan kehendak bersama untuk mencapai Sumber Daya Manusia(SDM) memiliki kapasitas yang berstandar internasional;
- Kata **‘Maju’** berarti memuat tekad untuk menjadi barometer kemajuan daerah di tingkat regional maupun nasional dengan memanfaatkan keunggulan komparatif;
- Kata **‘Berbudaya’** berarti prinsip utama dalam mengoptimalkan potensi dan identitas lokal berskala nasional/internasional (The Heart of Lombok)

2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 maka Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan yaitu :

- 1) Merawat Akhlakul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat;
- 2) Mencapai Sumber Daya Manusia yang cerdas , Mandiri dan Unggul;
- 3) Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih;
- 4) Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas;
- 5) Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur.

Berdasarkan hal tersebut diatas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dalam membantu Kepala Daerah melaksanakan Urusan Pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial, maka termuat dalam misi Kepala Daerah yang ke-2 (dua) yaitu :

- **MISI KEEMPAT : “Pembangunan ekonomi yang berkeselimbangan dan berkelanjutan didukung infrastruktur berkualitas”**

Misi Keempat ini menekankan pada pentingnya untuk mengurangi pengeluaran masyarakat miskin yang diimbangi dengan peningkatan cakupan perlindungan sosial masyarakat miskin,

peningkatan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat miskin, peningkatan bantuan pendidikan untuk masyarakat miskin, aksesibilitas dan kualitas pelayanan sosial dasar guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan, meningkatnya kerjasama dan kemitraan komponen pelaku pembangunan dibidang kesejahteraan sosial untuk mendorong tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) , terwujudnya pemberdayaan masyarakat miskin dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan, serta terwujudnya pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Tabel 3.3. Permasalahan pelayanan Dinas Sosial berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Renstra	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Urusan Sosial				
1	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial PMKS	Pemberdayaan PMKS Belum Optimal	Tingginya PMKS, Data PMKS belum akurat, Metode pembinaan yang belum tepat	Tersedianya PSKS sebagai pilar kesejahteraan sosial
		Intensitas Pembinaan Terhadap PSKS masih rendah	Keterbatasan Sumberdaya	Kebijakan Daerah

Sumber: Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah 2021

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan urusan Pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang social secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Lombok Tengah.

Untuk Pembangunan bidang kesejahteraan Sosial, dalam menangani berbagai permasalahan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) harus menyentuh berbagai aspek baik yang ada di desa maupun diperkotaan.

Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai pelayanan Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah

Tabel 3.4. Hasil Kajian Dokumen KLHS Kabupaten Lombok Tengah

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan			
2.	Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup	Potensi Terjadinya Bencana yg tdk bisa di prediksi	Meningkatnya Intensitas Pelayanan sosial tanggap darurat terhadap korban bencana	Program Penanganan Bencana
3.	Kinerja layanan/ jasa ekosistem			
4.	Efesiensi pemanfaatan sumber daya alam			
5.	Tingkat ketentraman dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Pada musim kemarau terdapat beberapa wilayah selatan yang berdampak pada kekeringan dan kekurangan air bersih	Tingginya permohonan warga terhadap bantuan penyaluran air bersih	Program Penanganan Bencana
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati			

Sumber: Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Untuk menentukan Isu-isu Strategis yang akan dihadapi Dinas Sosial pada tahun 2021-2026 perlu mengidentifikasi permasalahan yang berdampak pada pelayanan SKPD seperti yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya. Berikut identifikasi permasalahan pelayanan SKPD terhadap berbagai aspek kajian pada bab-bab sebelumnya:

Tabel 3.5. Tabel Identifikasi Permasalahan Pelayanan SKPD dari berbagi Aspek Kajian

NO	Identifikasi Permasalahan Pelayanan SKPD dari berbagai aspek					
	Gambaran Pelayanan SKPD	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi NTB	Sasaran Jangka Menengah RPJMD Kab. Loteng	Implikasi RT/RW	Implikasi KHLS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kapasitas pelayanan publik terkait TUPOKSI belum memadai , Beban Pelayanan SKPD yang tidak diimbangi dengan Sumber Daya yang memadai	Terwujudnya Pemberdayaan PMKS yang berkualitas	Pemberdayaan PMKS Belum Optimal	Masih Rendahnya Cakupan Layanan Dasar bagi PMKS		
2	Kurangnya Sarana dan Prasarana yang memadai	Terbinanya Lembaga Sosial yang aktif dan berkelanjutan	Intensitas Pembinaan Terhadap PSKS dan Lembaga Sosial masih rendah	Belum Optimalnya Pemberdayaan terhadap PSKS dan Lembaga-lembaga Sosial		

Sumber: Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah 2021

Adapun Isu Strategis yang menjadi tantangan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah pada Renstra tahun 2021-2026 yaitu :

1. Tingginya Masalah Kesejahteraan Sosial yang tidak diimbangi dengan Pemberdayaan PMKS secara Optimal;
2. Belum optimalnya peran PSKS dan Lembaga-lembaga Sosial dalam menangani pembangunan kesejahteraan sosial;
3. Tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial;
4. Tingginya angka keterlantaran anak dan lanjut usia;
5. Masih rendahnya kualitas pelayanan dalam Panti Sosial;
6. Banyaknya Korban tindak kekerasan terhadap anak perempuan dan pekerja migran;
7. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah sosial di lingkungannya;
8. Tingginya frekwensi kejadian bencana alam dan sosial;
9. Masih rendahnya kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada lima tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi kepala daerah serta didasarkan pada isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, tujuan merupakan tahapan perumusan strategi , kebijakan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi misi Kepala Daerah tahun 2021-2026.

Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Berdasarkan uraian diatas maka Tujuan yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun kedepan yaitu :

- 1.1. Meningkatnya Kualitas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 1.2. Meningkatnya kualitas penanganan bencana

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun kedepan.

Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah adalah suatu dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi tentang sesuatu yang akan dicapai, berdasarkan hal tersebut diatas Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah merumuskan dan menetapkan pernyataan sasaran berdasarkan masalah, Isu Strategs dan tujuan OPD selama 5 (lima) Tahun kedepan. Yang terbagi menurut Urusan Wajib dan Pilihan sesuai Tupoksi OPD. Adapun Sasaran dimaksud, seperti pada table berikut ini :

Tabel.4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat daerah

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Sosial									
1.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS)			Persentase Graduasi mandiri	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
		1.	Meningkatnya PMKS yang ditangani	Persentase Cakupan PMKS	80,27 %	80,27 %	80,27 %	80,27 %	80,27 %	80,27 %
2.	Cakupan Penanganan Bencana			Persentase Penanganan Bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		1.	Optimalisasi Penanganan Bencana	Cakupan Penanganan Korban Bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah 2021

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Startegi

Strategi Merupakan Rumusan Perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Permendagri No.24 th 2010).

Startegi yang akan digunakan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah adalah dengan metode SWOT yang merupakan teknik alisis lingkungan strategis dengan peneropongan lingkungan (Environmental Scanning) sesuai kondisi Lingkungan baik Lingkungan Internal (Kekuatan, Kelemahan) maupun Eksternal (Peluang, Ancaman). Berikut analisis Lingkungan strategis Dinas Sosial berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya :

a. Lingkungan Internal

- **Kekuatan (S)**
 - ✓ Adanya Tekad yang Kuat dari semua komponen
 - ✓ Adanya berbagai regulasi tentang penyelenggaraan urusan Sosial
 - ✓ Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM)
 - ✓ Tersedianya Anggaran
 - ✓ Tersedianya SOP
- **Kelemahan (W)**
 - ✓ Terbatasnya SDM yang Profesional
 - ✓ Sarana dan prasarana yang belum memadai
 - ✓ Terbatasnya Anggaran
 - ✓ Belum optimalnya peran PSKS,Lembaga Sosial dan pendamping lainnya
 - ✓ SOP masih yang dijalankan belum optimal

b. Lingkungan Eksternal

- **Peluang (O)**
 - ✓ Adanya berbagai PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) di Daerah

- ✓ Tersedianya SDM Kesejahteraan Sosial
- ✓ Tersedianya Dunia Usaha
- ✓ Terbentuknya Forum CSR
- ✓ Tingginya Animo Masyarakat dalam penanganan PMKS
- Ancaman (T)
 - ✓ Tingginya angka PMKS
 - ✓ Masih Tingginya angka Kemiskinan
 - ✓ Data PMKS dan PSKS masih kurang Valid
 - ✓ Perlindungan Sosial terhadap Pekerja Migran masih rendah.
 - ✓ Kualitas Lembaga Sosial masih rendah

Dari kajian lingkungan stregis diatas berikut alternative strategi yang akan digunakan Dinas Sosial Kabupaten Lombok tengah dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan :

<div>INTERNAL</div> <div>EKSTERNAL</div>	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	<div>✓ Adanya Kewenangan Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD dalam menagani urusan Sosial</div> <div>✓ Adanya berbagai regulasi tentang penyelenggaraan urusan Sosial</div> <div>✓ Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM)</div> <div>✓ Tersedianya Anggaran</div> <div>✓ Tersedianya SOP</div>	<div>✓ Terbatasnya SDM yang Profesional</div> <div>✓ Sarana dan prasarana yang belum memadai</div> <div>✓ Terbatasnya Anggaran</div> <div>✓ Belum optimalnya peran PSKS,Lembaga Sosial dan pendamping lainnya</div> <div>✓ SOP masih yang dijalankan belum optimal</div>
PELUANG (O)	ALTERNATIF STRATEGI (SO)	ALTERNATIF STRATEGI (WO)
<div>✓ Adanya berbagai PSKS di Daerah</div> <div>✓ Tersedianya SDM Kesejahteraan Sosial</div> <div>✓ Tersedianya Peluang Dunia Usaha dalam penanganan PMKS</div> <div>✓ Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan</div>	<div>1. Optimalkan pembinaan kepada PSKS dan Lembaga- lembaga Sosial yang ada di Daerah</div> <div>2. Optimalisasi Sumber daya dan anggaran dalam melakukan pembinaan terhadap PMKS dan PSKS</div> <div>3. Regulasi Peraturan Daerah/Bupati tentang CSR di daerah</div> <div>4. Meningkatkan kualitas SDM tenaga kesejahteraan sosial dalam penanganan PMKS</div>	<div>1. Peran dan kewenangan SKPD dalam mengoptimalkan fungsi PSKS dan lembaga-lembaga sosial</div> <div>2. Mengoptimalkan SDM yang tersedia untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan PMKS dan PSKS</div> <div>3. Pembentukan dan Pembinaan Forum CSR dalam penanganan PMKS</div> <div>4. Tingkatkan Kualitas Tenaga kesejahteraan sosial dalam menangani PMKS</div>

Sosial ✓ Tingginya Animo Masyarakat untuk turut serta dalam penanganan PMKS	5. Koordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi dan daerah lain dalam pembinaan PSKS	5. Koordinasi, konsultasi dan kerjasam dengan pemerintah pusat Provinsi dan daerah lainnya guna memaksimalkan PSKS
ANCAMAN (T)	ALTERNATIF STRATEGI (ST)	ALTERNATIF STRATEGI (WT)
✓ Tingginya angka PMKS ✓ Masih Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan PMKS ✓ Perlindungan Sosial Pekerja Migran masih rendah. ✓ Kualitas dan kuantitas Tenaga kesejahteraan sosial masih rendah ✓ Pelaksanaan program dan kegiatan belum mengacu SOP	1. Pergunakan regulasi dan kewenanga dalam managani PMKS secara tepat 2. Sosialisasi tentang berbagai regulasi tentang kesejahteraan sosial 3. Pelatihan keterampilan berusaha bagi pekerja migram bermasalah 4. Intensifikasi peran lembaga2 sosial 5. Penyusunan SOP pelayanan sosial	1. Restrukturisasi organisasi untuk mengoptilkan pelayanan social tenaga kesejahteraan sosial. 2. Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga sosial 3. Pemberian bantuan modal usaha bagi eks pekerja migrant bermasalah 4. Intensifikasi, PSKS ,Lembaga pelatihan dan lembaga lainnya dalam membantu pemerintah menangani PMKS dan ketenaga kerjaan 5. Penerapan SOP sebagai pijakan dalam melaksanakan pelayanan sosial

Sumber: Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah 2021

2. Arah Kebijakan

Ketetapan atau ketentuan yang bersifat sebagai acuan, pedoman yang di terbitkan oleh yang berwenang tentang suatu bidang, substansi (obyek) tertentu demi tercapainya tujuan serta terpenuhinya kebutuhan kelompok sasaran yang dilayani.

Tabel berikut dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi Misi Bupati/Wakil Bupati dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah :

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Dinas Sosial

VISI : MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)				
MISI Keempat: Pembangunan ekonomi yang berkeselimbangan dan berkelanjutan didukung Infrastruktur berkualitas				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Urusan Sosial				
1.	Meningkatnya Kualitas Penanganan PMKS	Meningkatnya PMKS yang ditangani	Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan PMKS	Meningkatkan Cakupan Layanan PMKS
2.	Cakupan Penanganan Bencana	Optimalisasi Penanganan Bencana	Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Korban Bencana	Meningkatkan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial(PSKS)
				Meningkatkan Layanan Data, Pengaduan dan Rujukan PMKS
				Meningkatkan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten(TMPNK)

Sumber: Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah 2021

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka mewujudkan Visi Misi Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 maka perlu ditetapkan Kebijakan Operasional dalam bentuk Program dan Kegiatan seperti pada tabel berikut :

MATRIKS RENSTRA 2021 - 2026 DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Tuj uan	Sasaran/Program/Kegiatan/Su b Kegiatan				Indikator Tujuan/Sasar an/Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perenca naan (2020)	Target Kinerja Program, dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangk at Daerah(2026)	Perangk at Daerah Penangg ungjawa b	Lokasi			
							2021		2022		2023		2024		2025					2026		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.	
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Tujuan : meningkatnya kualitas penanganan PMKS					Persentase Graduasi mandiri	1%	0,01 %	5.974.647.051	0,01%	10.610.978.200	0,01%	11.071.000.000	0,01%	11.730.000.000	0,01%	13.704.300.000	0,01%	15.432.960.000	1,06 %	DINAS SOSIAL		
	Sasaran : Meningkatnya PMKS yang ditangani				Persentase Cakupan PMKS	70 %	80,27 %	5.974.647.051	80,27 %	10.610.978.200	80,27 %	11.071.000.000	80,27 %	11.730.000.000	80,27 %	13.704.300.000	80,27 %	15.432.960.000	80,27 %			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			Persentase PSKS yang dibina	37,65%	40,35%	55.964.534	50,15%	162.000.000	61,64%	350.000.000	73,81%	429.000.000	86,43%	520.800.000	99,95%	677.960.000	99,95%			
			Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Lembaga yang tersosialisasi UGB/PUB	100%	0	0	100%	15.000.000	100%	30.000.000	100%	45.000.000	100%	60.000.000	100%	125.000.000	100%		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Lembaga yang mengikuti Sosialisasi UGB /PUB	13 lembaga/ 25 org	0	0	30 Lembaga / 30 org	15.000.000								43 Lembaga / 55 org		Loteng		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban Izin UGB dan PUB						5 Dokume n	30.000.000	5 Dokumen	45.000.000	5 Dokume n	60.000.000	5 Dokume n	125.000.000	20 Dokume n			

Renstra 2021-2026

				Pengembangan Potensi Sumber kesejahteraan Sosial daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang ditingkatkan kapasitasnya	37,65%	40,35%	55.964.534	50,15%	147.000.000	61,64%	320.000.000	73,81%	384.000.000	86,43%	460.800.000	99,95%	552.960.000	99,95%		
				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM yang mengikuti pelatihan	100	0	0	20 Orang	15.000.000									120 Orang		Loteng
					Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas PSM Kewenangan Kabupaten/Kota					25 Orang	30.000.000	25 Orang	36.000.000	25 Orang	43.200.000	25 Orang	51.840.000	100 Orang			
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang dibina	12 orang	0	0	12 Orang	57.000.000									12 Orang		Loteng
					Jumlah TKSK yang meningkat kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota					12 Orang	100.000.000	12 Orang	120.000.000	12 Orang	144.000.000	12 Orang	172.800.000	12 Orang			
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Kesejahteraan Sosial(LKS) dan Karang Taruna(KT) yang dibina	109 LKS/109 org dan 78 KT/78 org	12 LKS/12 org dan 12 KT/12 org,	55.964.534	15 LKS/15 org dan 15 KT/15 org	50.000.000									136 LKS/136 org, 105 KT/105 org		Loteng

Renstra 2021-2026

					Jumlah lembaga Kesejahteraan Sosial(LKS) yang meningkat kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota					20 LKS	150.000.000	20 LKS	180.000.000	20 LKS	216.000.000	24 LKS	259.200.000	84 LKS		
					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah pengelola LK3 yang dibina	10 org	0	0	10 orang	25.000.000							10 Orang		Loteng
						Jumlah Sertifikat yang dari hasil Peningkatan SDM dan LK3 Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Sertifikat	40.000.000	1 Sertifikat	48.000.000	1 Sertifikat	57.600.000	1 Sertifikat	69.120.000	4 Sertifikat		
					PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	% Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100 %	0 %	0	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %		
						Cakupan warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani	768 org	0	0	200 org	50.000.000	200 org	50.000.000	200 org	50.000.000	200 org	50.000.000	1.000 org		
					Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	768 orang	0 %	0	200 org	50.000.000	200 org	50.000.000	200 org	50.000.000	200 org	50.000.000	1.768 org		
					Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	768	0 %	0	200 org	50.000.000							968 org		

Renstra 2021-2026

				Asal																
					Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Propinsi untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/kota					200 org	50.000.000	200 org	50.000.000	200 org	50.000.000	200 org	50.000.000	800 org		
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	52,61%	54,96%	1.009.944.402	61,71%	1.199.978.200	70.43%	1.400.000.000	73,69%	1.092.000.000	78,12%	1.274.500.000	83,68%	1.450.000.000	83,68%	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yg mendapatkan layanan kebutuhan dasarnya	2.010 orang	663 orang	226.039.849	1.905 orang	829.978.200	2.460 orang	972.500.000	920 orang	645.000.000	1.250 orang	817.500.000	1.570 orang	990.000.000	10.778 orang	
				Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	1.774 Orang	597 Orang	169.165.949	900 Orang	259.978.200								3.371 Orang		Loteng

Renstra 2021-2026

					Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota					1.050 Orang	265.000.000	500 Orang	150.000.000	750 Orang	225.000.000	1.000 Orang	300.000.000	3.300 Orang		
					Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar , Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket sandang	100 org	0	0	750 Orang	200.000.000							850 Orang		Loteng
						Jumlah Orang yang menerima Pakaian dan Kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				1.050 Orang	240.000.000	100 Orang	50.000.000	150 Orang	75.000.000	200 Orang	150.000.000	1.500 Orang		
					Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan / memanfaatkan alat bantu	50 Orang	66 Orang	56.873.900	100 Orang	100.000.000							216 Orang		Loteng

					Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota					120 Orang	120.000.000	130 Orang	130.000.000	140 Orang	140.000.000	150 Orang	150.000.000	540 Orang		
					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Anak Terlantar Mendapatkan Bimbingan berupa Diklat	20 org	0	0	25 Orang	150.000.000							45 Orang		Loteng
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar Mendapatkan Bimbingan berupa Diklat	16 org	0		20 Orang								36 Orang		
						Jumlah Gepeng Mendapatkan Bimbingan berupa Diklat	10 org	0		10 Orang								20 Orang		
						Jumlah peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						65 orang	200.000.000	55 Orang	150.000.000	65 orang	200.000.000	65 orang	200.000.000	250 Orang

					Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar .Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yg difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	20 org	0	0	40 Orang	50.000.000							60 Orang		Loteng
						Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kot a				50 orang	62.500.000	60 orang	75.000.000	70 orang	87.500.000	80 Orang	100.000.000	260 Orang		
					Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar .Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yg dirujuk	20 org	0	0	60 Orang	70.000.000							80 Orang		Loteng
						Jumlah Orang mendapatkan layanan rujukan Kewenangan Kabupaten/Kot a				70 Orang	85.000.000	75 Orang	90.000.000	75 Orang	90.000.000	75 Orang	90.000.000	295 Orang		

				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan kebutuhan dasar dan pengaduan	100 %	0,39%	783.904.553	0,50%	370.000.000	0,63%	427.500.000	0,67%	447.000.000	0,67%	457.000.000	0,68%	460.000.000	3,65%		
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Dokumen Data dan Pengaduan yang dimiliki	3 Dokumen	1 Dokumen	551.202.954	2 Dokumen	150.000.000								2 Dokumen		Loteng	
					Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota						1.750 Orang	160.000.000	1.550 Orang	170.000.000	1.550 Orang	180.000.000	1.550 Orang	180.000.000	6.400 Orang		
				Penyediaan Permakanan	Jumlah korban tindak kekerasan dan PMKS Lainnya yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	60	166 Orang	36.929.800	200 Orang	70.000.000								426 orang		Loteng	
					Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal Kewenangan Kabupaten/Kota						250 Orang	87.500.000	277 Orang	97.000.000	277 Orang	97.000.000	285 Orang	100.000.000	1.089 Orang		

				Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) Yang Mendapatkan Paket Modal Usaha	200	70 Orang	150.000.000	100 Orang	100.000.000							370 Orang		Loteng
					Jumlah Peserta dalam pemberian bimbingan sosial kepada keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan Kabupaten/Kota				120 Orang	120.000.000	120 Orang	120.000.000	120 Orang	120.000.000	120 Orang	120.000.000	480 Orang		
				Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Yang Ditangani	16 Kasus	30 Kasus	45.771.799	40 Kasus	50.000.000							86 Kasus		Loteng
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja sama antar Lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				60 Dokumen	60.000.000	60 Dokumen	60.000.000	60 Dokumen	60.000.000	60 Dokumen	60.000.000	240 Dokumen		
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase fakir miskin dan anak terlantar yang ditangani	100%	0,31%	997.028.938	0,98%	4.330.000.000	1,85%	3.980.000.000	2,20%	5.080.000.000	2,54%	6.480.000.000	2,89%	7.680.000.000	11,47%

					Jumlah fakir miskin dan anak terlantar yang tertangani	230 org	90 org	997.028.938	280 org	4.330.000.000	530 org	3.980.000.000	630 org	5.080.000.000	730 org	6.480.000.000	830 org	7.680.000.000	830 0rg		
				Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	Jumlah rumah singgah/shelter /tempat tinggal sementara yg memenuhi standar utk pemeliharaan anak terlantar	1 Unit	0	0	1 Unit	250.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit		Loteng
				Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan akses penjangkauan	30 org	0	0	30 org	30.000.000									60 Orang		Loteng
					Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau kewenangan kabupaten/kot a						30 org	30.000.000	30 org	30.000.000	30 org	30.000.000	30 org	30.000.000	120 org		
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir miskin yang difasilitasi data dan yang mendapatkan bantuan sosial	167.415 KPM	192.570 KPM	997.028.938	405.620 KPM	4.330.000.000	412.870 KPM	3.980.000.000	427.970 KPM	5.080.000.000	443.070 KPM	6.480.000.000	453.170 KPM	7.680.000.000	453.170 KPM		
				Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data DTKS yang diperbaharui secara menyeluruh	1 Dok	0	0	1 Dokumen	1.800.000.000									1 Dokumen		12 Kecamatan

Renstra 2021-2026

					Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Jabupaten/Kota yang di Data					0	0	0	0	0	0	0	0		
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin yang dilakukan perbaikan datanya	167.415 KPM	0	0	190.000 KPM	550.000.000							190.000 KPM		12 Kecamatan
					Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				190.000 KPM	700.000.000	190.000 KPM	800.000.000	190.000 KPM	900.000.000	190.000 KPM	1.000.000.000	190.000 KPM		
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah KPM yang mendapatkan program BPNT	96.375 KK	107.480 KPM	474.113.333	130.370 KK	500.000.000							130.370 KPM		12 Kecamatan
					Jumlah KPM yang mendapat bantuan PKH	70.840 KPM	85.000 KPM	303.514.700	85.000 KPM	600.000.000							85.000 KPM		
					Jumlah KPM yang mendapatkan Bansos Kesejahteraan Keluarga				130.370 KPM (BPNT)	600.000.000	130.370 KPM	600.000.000	130.370 KPM	600.000.000	130.370 KPM	600.000.000	130.370 KPM		
					Kewenangan Kabupaten/Kota				92.000 KPM (PKH)	1.200.000.000	107.000 KPM	1.900.000.000	122.000 KPM	2.900.000.000	132.000 KPM	3.800.000.000	132.000 KPM		
				Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah masyarakat keluarga fakir miskin yang mendapatkan Pelatihan dan Paket Modal Usaha (UEP)	200 Org/20 Kelompok	90 Orang/9 Kelompok	219.400.905	250 Orang/25 Kelompok	600.000.000							540 orang		Loteng

Renstra 2021-2026

					Jumlah Orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kot a					500 Orang	1.200.000.000	600 Orang	1.500.000.000	700 Orang	1.800.000.000	800 Orang	2.000.000.000	2.600 Orang			
Tujuan 2 : Cakupan Penanganan Bencana					Persentase Penanganan Bencana	100 %	100 %	406.907.968	100 %	782.000.000	100 %	1.010.000.000	100 %	1.310.000.000	100 %	1.174.000.000	100 %	1.686.000.000	100 %		
				Sasaran : Optimalisasi Penanganan Bencana	Cakupan Penanganan Korban Bencana	100 %	100 %	406.907.968	100 %	782.000.000	100 %	1.010.000.000	100 %	1.310.000.000	100 %	1.174.000.000	100 %	1.686.000.000	100 %		
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya	100%	100%	406.907.968	100%	782.000.000	100%	1.010.000.000	100%	1.310.000.000	100%	1.174.000.000	100%	1.686.000.000	100%		
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan bantuan	100 %	100 %	347.437.100	100 %	660.000.000	100 %	760.000.000	100 %	880.000.000	100 %	864.000.000	100 %	1.196.000.000	100 %		
				Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	457 Orang	400 Orang	347.437.100	400 Orang	500.000.000								1.257 Orang		Loteng	

Renstra 2021-2026

					Jumlah Orang yang mendapatkan permakanaan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat(Pengungsian) kewenangan kabupaten/kot a					400 Orang	600.000.000	400 Orang	720.000.000	400 Orang	864.000.000	400 Orang	1.036.000.000	1.600 Orang		
					Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	457 org	0	0	400 org	60.000.000							857 Orang		Loteng
						Jumlah Orang yang mendapatkan Pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat(Pengungsian) dan pasca Bencana kewenangan kabupaten/kot a				400 org	60.000.000	400 org	60.000.000	400 org	60.000.000	400 org	60.000.000	1.600 Orang		
					Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	1 unit	0	0	1 unit	50.000.000							1 unit		Pujut,Pra ya Timur, Batuklia ng Utara
						Jumlah Tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kot a					1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	
					Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	457 org	0	0	400 org	50.000.000							857 Orang		Loteng

					Jumlah Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan kabupaten/kot a					400 org	50.000.000	400 org	50.000.000	400 org	50.000.000	400 org	50.000.000	1.600 Orang		
					Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	% Tanaga Yang Memenuhi Standar Kompetensi	100%	100%	59.470.868	100%	72.000.000	100%	100.000.000	100%	280.000.000	100%	310.000.000	100%	340.000.000	100%
					Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibina	1 KSB/50 org	0	0	1 KSB/50 org	50.000.000							2 KSB/100 org		Loteng
						Jumlah Kampung yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan kampong siaga bencana kewenangan kabupaten/kota					1 KSB	150.000.000	1 KSB	155.000.000	1 KSB	160.000.000	1 KSB	165.000.000	4 KSB	
					Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga bencana yang dibina	40 Orang	40 org	59.470.868	40 org	72.000.000							40 org		Loteng
						Jumlah orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna siaga bencana kewenangan kabupaten/kota					40 org	100.000.000	40 org	125.000.000	40 org	150.000.000	40 org	175.000.000	40 org	

				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	% Sarana dan Prasarana TMPNK yang layak	100%	100%	27.964.337	100 %	140.000.000	100 %	210.000.000	100 %	220.000.000	100 %	230.000.000	100 %	240.000.000	100 %		
					Jumlah TMP Daerah yang dikelola	1 TMP Daerah	1 TMP Daerah	27.964.337	1 TMP Daerah	140.000.000	1 TMP Daerah	210.000.000	1 TMP Daerah	220.000.000	1 TMP Daerah	230.000.000	1 TMP Daerah	240.000.000	1 TMP Daerah		
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	TMPNK yang mendapatkan pemeliharaan dan pengamanan	1 TMPNK	1 TMPNK	27.964.337	1 TMPNK	140.000.000	1 TMPNK	210.000.000	1 TMPNK	220.000.000	1 TMPNK	230.000.000	1 TMPNK	240.000.000	1 TMPNK		
				Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	TMPNK yang direhab/diperb aiki	1 TMPNK	0	0	1 TMPNK	100.000.000								1 TMPNK		Praya	
					Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana TMPNK					1 Dokume n	150.000.000	1 Dokumen	160.000.000	1 Dokume n	170.000.000	1 Dokume n	180.000.000	4 Dokume n			
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	TMPNK yang mendapatkan pemeliharaan	1 TMPNK	1 TMPNK	27.964.337	1 TMPNK	20.000.000								1 TMPNK		Praya	
					Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaann pada TMPNK					1 Makam	30.000.000	1 Makam	30.000.000	1 Makam	30.000.000	1 Makam	30.000.000	4 Makam			

Renstra 2021-2026

				Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	TMPNK yang mendapatkan pengamanan	1 TMPNK	0	0	1 TMPNK	20.000.000								1 TMPNK	Praya
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan TMPNK				1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP OPD	CC	B	3.476.836.872	B	3.997.000.000	B	4.321.000.000	B	4.089.000.000	BB	4.209.000.000	BB	4.221.000.000	BB
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase IKU OPD yang tercapai	100 %	100 %	36.831.753	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	70.000.000	100%	75.000.000	100%	80.000.000	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja SKPD	7 Dokumen	8 Dokumen	36.831.753	7 Dokumen	60.000.000	7 Dokumen	65.000.000	7 Dokumen	70.000.000	7 Dokumen	75.000.000	7 Dokumen	80.000.000	7 Dokumen
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan hasil pemeriksaan keuangan OPD	5 %	5%	2.985.729.767	5%	3.050.000.000	5%	3.055.000.000	5%	3.060.000.000	5%	3.065.000.000	5%	3.070.000.000	5%
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	2.954.504.725	12 Bulan	3.000.000.000	12 Bulan	3.000.000.000	12 Bulan	3.000.000.000	12 Bulan	3.000.000.000	12 Bulan	3.000.000.000	12 Bulan
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Bulanan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	31.225.042	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	55.000.000	12 Dokumen	60.000.000	12 Dokumen	65.000.000	12 Dokumen	70.000.000	12 Dokumen
					Laporan Tahunan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen

Renstra 2021-2026

			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM dengan capaian kinerja lebih dari 80 %	90%	90%	0	90%	20.000.000	90%	30.000.000	90%	40.000.000	90%	50.000.000	90%	60.000.000	90%		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peserta Diklat Pegawai	0	0	0	2 Orang	20.000.000	3 Orang	30.000.000	3 Orang	40.000.000	3 Orang	50.000.000	3 Orang	60.000.000	3 Orang		Loteng
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	117.552.069	100%	422.000.000	100%	445.000.000	100%	467.000.000	100%	490.000.000	100%	500.000.000	100%		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Korden	0	40 Meter	33.030.069	50 Meter	290.000.000	Korden 30 M	300.000.000	Laptop 2 unit	320.000.000	Korden 60 M	340.000.000	Korden 70 Meter	350.000.000	Korden 70 Meter		Loteng
				Kursi Kerja	0	0		11 Buah		Kursi Kerja Pejabat 12 Unit		Mesin Potong Rumput/Brush Cutter 2 Unit		Kursi Plastik 50 Buah		Toolset 1 Set		Toolset 1 Set		
				Kursi Rapat	0	0		50 Buah		Meja Kerja Pejabat 12 Unit		Kursi Kerja Staf 12 Unit		LCD Proyektor 1 Unit		Printer Epson 1 Buah		Printer Epson 1 Buah		
				Laptop	0	0		1 Unit		Laptop 1 Unit		Meja Kerja Staf 12 Unit		Printer Epson 3 Buah		Kursi Kerja Staff 15 Buah		Kursi Kerja Staff 15 Buah		
				Meja Kerja	0	0		11 Buah		Komputer PC 2 Unit		Bahan/alat-alat listrik 1Paket		Bahan/alat-alat listrik 1Paket		2 Unit AC		2 Unit AC		
				Meja Resepsionis	0	0		1 Buah		Mesin Foto Copy 1 Unit		Kursi Tunggu 3 set		Kursi Tunggu 4 set		Kursi Tunggu 5 set		Kursi Tunggu 5 set		
				Sound sistem rapat	0	0		1 Paket		Printer 2 Unit		0		0		0		0		
				Meja Rapat	0	0		1 Set		0		0		0		0		0		
				Tandon 1.500 Liter	0	0		2 Buah		0		0		0		0		0		
				Mesin Air	0	2 Unit		0		0		0		0		0		0		

Renstra 2021-2026

				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan Minum	21 kali	25 kali	31.950.000	21 kali	32.000.000	25 kali	35.000.000	27 kali	37.000.000	30 kali	40.000.000	30 kali	40.000.000	30 kali		Loteng
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi	4 laporan	6 laporan	52.572.000	10 laporan	100.000.000	11 laporan	110.000.000	11 laporan	110.000.000	11 laporan	110.000.000	11 laporan	110.000.000	11 Diaporan		Luar Daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Validasi Data Barang Milik Daerah	100%	0	0	100%	45.000.000	100%	300.000.000			100%	50.000.000					
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan operasional Roda 2	0	0	0	3 Unit	45.000.000					3 unit	50.000.000				Loteng	
					Kendaraan operasional Roda 4	0	0	0		1 unit	300.000.000										
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Layanan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	113.302.600	12 Bulan	105.000.000	12 Bulan	115.000.000	12 Bulan	125.000.000	12 Bulan	135.000.000	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan		
				Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan Internet	6000 Mb	6000 Mb	58.353.600	6.000 MB	50.000.000	Jasa Internet 6.000 MB	55.000.000	7.000 MB	60.000.000	7.000 MB	65.000.000	7.000 MB	70.000.000	7.000 MB	Loteng	
					Layanan Air	3240 M3	3240 M3		3.240 M3		Jasa Air 3.240 M3		3.300 M3		3.300 M3						
					Layanan Listrik	21000 KWh	21000 KWh		21.000 KWh		Jasa Listrik 21.000 KWh		22.000 KWh		22.000 KWh						
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Layananan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan	54.949.000	12 Bulan	55.000.000	12 bulan	60.000.000	12 Bulan	65.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	90%	90%	223.420.683	90%	295.000.000	90%	311.000.000	90%	327.000.000	90%	344.000.000	90%	361.000.000	90%		

Renstra 2021-2026

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	STNK kendaraan dinas dan oprasional yg diperbaharui	27 Unit	20 Unit	204.232.000	29 Unit	250.000.000	29 Unit	260.000.000	29 Unit	270.000.000	29 Unit	280.000.000	29 Unit	290.000.000	29 Unit		Loteng
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan mesin lainnya yg diservice	23 Unit	12 Unit	8.160.000	23 Unit	15.000.000	26 Unit	16.000.000	25 Unit	17.000.000	26 Unit	19.000.000	27 Unit	21.000.000	27 Unit		
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor yg terpelihara/ direhab	0	1 Unit	11.028.683	1 Unit	30.000.000	1 Unit	35.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	45.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Daerah tahun 2021-2026 maka perlu menetapkan capaian kinerja bagi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sebagai penyelenggara bidang urusan sosial untuk mencapai tujuan sasaran RPJMD berikut :

Tabel 7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang mengacu pada pencapaian Tujuan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
URUSAN SOSIAL								
1.	Persentase Graduasi mandiri	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
2.	Persentase Cakupan PMKS	80,27%	80,27%	80,27%	80,27%	80,27%	80,27%	80,27 %
3.	Persentase Penanganan Bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Cakupan Penanganan Korban Bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah 2021

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen Perencanaan Periode 5 (lima) Tahunan yang menuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah yang disusun dengan memperhatikan segala potensi dan kebutuhan.

Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 merupakan Penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 dan akan menjadi Dokumen dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah selama 5 (lima) Tahun kedepan.

Praya, 8 September 2021

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah



Drs. H. MUJIARDI YUNUS
NIP. 19510424 199103 1 015